

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah umum terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan industri menjadi salah satu faktor peningkatan produksi sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah yang tidak baik menyebabkan timbulnya masalah persampahan kota, maka dari itu untuk mengurangi dampak negatif sampah dibutuhkan sistem pengelolaan persampahan kota.

Pengelolaan sampah saat ini menghadapi banyak tekanan terutama akibat besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan masih diterapkannya paradigma lama pengelolaan yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan yang membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu (Sudradjat, 2006).

Permasalahan persampahan harus diantisipasi agar tidak menimbulkan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah di kemudian hari, maka perlu dikembangkan sistem pengelolaan sampah dengan konsep *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R). Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan (Yulianto, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara lebih memadai, untuk kondisi tertentu TPA regional juga wajib dilaksanakan. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa pemerintah

kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, juga menyusun dokumen rencana induk.

Menurut SNI-19-3983-1995 menyatakan bahwa kota sedang memiliki jumlah penduduk 100.000-500.000 jiwa, sedangkan kota kecil memiliki jumlah penduduk <100.000 jiwa. Kabupaten Solok dikategorikan sebagai kota sedang karena memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 363.684 jiwa, sehingga dalam kegiatan perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Solok wajib menyusun dokumen PTMP (KPLHK Kabupaten Solok, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa kota sedang dan kecil diharuskan untuk menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP). PTMP merupakan rencana pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir, sedangkan aspek non teknis meliputi aspek peraturan, kelembagaan, biaya dan peran serta masyarakat.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Solok saat ini masih menghadapi beberapa masalah, antara lain masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan pengelolaan sampah. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Solok pada tahun 2015 hanya 6% dengan jumlah sampah terangkut sebesar 34,632 m³/hari. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kinerja pengelolaan sampah belum optimal dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah pada semua sistem pengelolaan sampah, dan masih sedikit masyarakat maupun pihak swasta yang melakukan upaya 3R untuk pengelolaan sampah. Penerapan PTMP ini diharapkan dapat mengatasi beragam permasalahan sampah di Kabupaten Solok sehingga menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dan kondisi kesehatan masyarakat yang baik, yang akhirnya berpengaruh pada perkembangan fisik Kabupaten Solok.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah membuat perencanaan teknis dan manajemen persampahan Kabupaten Solok dengan konsep 3R.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah:

1. Mengevaluasi sistem pengelolaan persampahan yang telah ada di Kabupaten Solok;
2. Merencanakan daerah pengembangan dan tingkat pelayanan serta target 3R di Kabupaten Solok;
3. Mengembangkan aspek teknis dan aspek non teknis pengelolaan sampah;
4. Menghitung rencana anggaran biaya untuk program lima tahun pertama (jangka pendek).

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah:

1. Sebagai dasar dan acuan bagi penelitian lanjutan di bidang persampahan;
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta kebijakan dalam mengatasi masalah persampahan untuk masa yang akan datang bagi pemerintah Kabupaten Solok khususnya Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada tugas akhir ini adalah:

1. Evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah yang telah ada terhadap peraturan/standar mengenai pengelolaan sampah;
2. Perencanaan lokasi pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok dengan membuat zona pengembangan daerah pelayanan dan tingkat pelayanan serta target 3R dalam kurun waktu 15 tahun (2017-2031) yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Perencanaan pengembangan aspek teknis persampahan meliputi:
 - a. Perencanaan jumlah pewadahan yang dibutuhkan berdasarkan pola

pewadahan yang direncanakan di setiap zona dan penentuan perletakan wadah sampah berdasarkan zona-zona pengembangan di jangka pendek perencanaan;

- b. Penentuan pola pengumpulan sampah di Kabupaten Solok sesuai dengan zona-zona pengembangan;
 - c. Penentuan rute pengangkutan sampah yang paling efektif berdasarkan jarak dan waktu tempuh di jangka pendek perencanaan;
 - d. Perencanaan pengelolaan sampah berbasis 3R di masing-masing zona pelayanan dengan skala kawasan dan perhitungan luas TPS 3R berdasarkan pengolahan apa yang akan dilakukan dari potensi 3R yang ada;
 - e. Pembuatan *layout* TPS 3R;
 - f. Perhitungan kebutuhan luas TPA.
4. Perencanaan pengembangan aspek non teknis persampahan meliputi peningkatan aspek kelembagaan, peraturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat;
 5. Perencanaan anggaran biaya untuk program kegiatan 5 tahun pertama (jangka pendek).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan perencanaan, manfaat perencanaan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori dan peraturan mengenai persampahan seperti sumber, klasifikasi, komposisi dan timbulan sampah serta menjelaskan mengenai perencanaan teknis pengelolaan persampahan sistem pengelolaan sampah yang digunakan.

BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Berisi tentang kondisi fisik dan aspek non fisik yang ada di Kabupaten Solok.

**BAB IV : PROFIL KONDISI EKSISTING SISTEM PERSAMPAHAN DI
KABUPATEN SOLOK**

Berisi tentang permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Solok meliputi timbula sampah, komposisi sampah, tingkat pelayanan, daerah pelayanan, aspek teknis dan aspek non teknis.

BAB V : METODOLOGI PERENCANAAN

Berisi tahapan perencanaan yang dilakukan terkait perencanaan teknis manajemen persampahan.

**BAB VI : IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN
PENGEMBANGAN**

Berisi tentang uraian mengenai kondisi eksisting pengelolaan persampahan dan upaya yang perlu dikembangkan pada sistem pengelolaan sampah.

**BAB VII : RANCANGAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KABUPATEN SOLOK**

Berisi tentang skenario menyeluruh sistem pengelolaan persampahan Kabupaten Solok untuk jangka panjang.

BAB VIII :RENCANA TINDAK LANJUT

Berisi tentang rencana detail kegiatan pengelolaan persampahan Kabupaten Solok dengan menggunakan metode 3R untuk 5 (lima) tahun pertama.

BAB IX : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari perencanaan yang telah diuraikan.

